

POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PELANGGARAN KEBIJAKAN ISI SIARAN PADA KPID JAWA TIMUR

*ORGANIZATIONAL COMMUNICATION PATTERNS IN DECISION-MAKING
REGARDING BROADCAST CONTENT POLICY VIOLATIONS AT THE EAST JAVA
REGIONAL INDONESIAN BROADCASTING COMMISSION (KPID)*

¹Priscilla Grasiona Mudin, ²Hamim, ³Maulana Arief

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

priscillagrasiana12@gmail.com

Abstract

This study examines the organizational communication patterns in decision-making related to violations of broadcast content policies at the East Java Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID). Organizational communication is defined as the process of exchanging information and meaning among organizational members to achieve common goals. The objectives of this research are to describe and analyze the communication patterns in decision-making at KPID East Java regarding broadcast content policy violations, identify factors influencing weak sanction enforcement, and analyze internal communication barriers contributing to the weak enforcement of these sanctions. Using systems theory to understand interactions between organizational components, this research applies a qualitative approach method to analyze phenomena in-depth within real-world contexts. The analysis results show that KPID East Java implements a star communication pattern characterized by information decentralization, collective decision-making, flexible information flow, and quick responses. This pattern aligns with KPID's "collective-collegial" system, enabling the organization to be responsive to the public, efficient in processes, and maintain a collective nature in decision-making regarding broadcast content policy violations.

Keywords: *KPID East Java, Organizational Communication Pattern, Decision-Making*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pola komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan terkait pelanggaran kebijakan isi siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur. Komunikasi organisasi didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi dan makna antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pola komunikasi pengambilan keputusan di KPID Jawa Timur terkait pelanggaran kebijakan isi siaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan sanksi, serta menganalisis hambatan-hambatan dalam komunikasi internal yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan sanksi tersebut. Dengan menggunakan teori sistem untuk memahami interaksi antar komponen organisasi, penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena secara mendalam dalam konteks nyata. Hasil analisis menunjukkan bahwa KPID Jawa Timur menerapkan pola komunikasi bintang yang ditandai dengan desentralisasi informasi, pengambilan keputusan kolektif, fleksibilitas alur informasi, dan respons cepat. Pola ini sesuai dengan sistem "kolektif-kolegial" KPID, memungkinkan organisasi untuk responsif terhadap masyarakat, efisien dalam proses, dan menjaga sifat kolektif dalam pengambilan keputusan pelanggaran kebijakan isi siaran.

Kata kunci: *KPID Jawa Timur, Pola Komunikasi Organisasi, Pengambilan Keputusan,*

Pendahuluan

Komunikasi organisasi memegang peranan fundamental dalam kelangsungan dan efektivitas suatu entitas organisasi. Komunikasi yang terstruktur dan efektif memungkinkan pertukaran informasi, pengambilan keputusan, koordinasi tugas, dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dalam konteks lembaga publik seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, komunikasi organisasi menjadi semakin krusial karena berkaitan erat dengan pelayanan kepada masyarakat dan penerapan kebijakan yang adil terkait pengawasan penyiaran.

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek komunikasi organisasi dan pengambilan keputusan. Budiman Putra dkk (2019) meneliti komunikasi organisasi dalam proses pengambilan keputusan di UPT-PTPH Sumatera Utara, menemukan bahwa komunikasi organisasi yang baik membantu proses penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan yang sistematis. Hidayat (2021) mengkaji pola komunikasi pimpinan dan karyawan melalui media WhatsApp, mengidentifikasi pola komunikasi informatif dan regulatif dalam konteks digital. Sementara itu, Ni Kadek Defvin Setyawati dkk (2022) meneliti pola komunikasi organisasi PDI Perjuangan dalam proses kaderisasi, menemukan pentingnya komunikasi formal dan informal dalam pengembangan kader partai.

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek komunikasi organisasi dan pengambilan keputusan dalam beragam konteks. Budiman Putra dkk (2019) meneliti komunikasi organisasi dalam proses pengambilan keputusan di UPT-PTPH Sumatera Utara, menemukan bahwa komunikasi organisasi yang baik membantu proses penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan yang sistematis. Hidayat (2021) mengkaji pola komunikasi pimpinan dan karyawan melalui media WhatsApp, mengidentifikasi pola komunikasi informatif dan regulatif dalam konteks digital. Sementara itu, Ni Kadek Defvin Setyawati dkk (2022) meneliti pola komunikasi organisasi PDI Perjuangan dalam proses kaderisasi, menemukan pentingnya komunikasi formal dan informal dalam pengembangan kader partai. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang komunikasi organisasi dalam berbagai setting, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang pola komunikasi organisasi dalam konteks lembaga pengawas penyiaran, khususnya terkait pengambilan keputusan pelanggaran isi siaran.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola komunikasi organisasi yang terjadi di KPID Jawa Timur dalam proses pengambilan keputusan terkait pelanggaran kebijakan isi siaran. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teori sistem sebagai kerangka analisis, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu komunikasi organisasi serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas KPID Jawa Timur dalam menjalankan fungsi pengawasan penyiaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menginvestigasi pola komunikasi organisasional dalam proses pengambilan keputusan terkait pelanggaran kebijakan isi siaran pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur. Metodologi kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks. Pendekatan studi kasus diimplementasikan untuk memfasilitasi analisis intensif terhadap kasus yang memiliki konteks spesifik. Menurut Sugiyono (2016: 17), pendekatan studi kasus melibatkan eksplorasi komprehensif terhadap program, peristiwa, proses, atau aktivitas yang melibatkan satu atau lebih entitas.

Fokus penelitian diarahkan pada Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Timur, dengan emphasis pada pola komunikasi dan mekanisme pengambilan keputusan antar anggota KPID dalam konteks pelanggaran kebijakan isi siaran. Akuisisi data dilakukan melalui kombinasi sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi resmi dan catatan administratif yang relevan.

Analisis data mengadopsi model Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013: 247-252). Proses reduksi data dilaksanakan untuk mengkonsolidasikan informasi ke dalam pola dan tema yang relevan. Penyajian data mengintegrasikan deskripsi naratif dengan representasi visual untuk mengartikulasikan pola komunikasi dan proses pengambilan keputusan secara komprehensif.

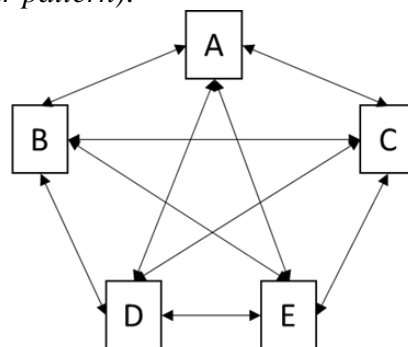
Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini mengimplementasikan teknik triangulasi sumber. Metode ini melibatkan komparasi dan konfirmasi data dari beragam sumber, termasuk anggota KPID dari berbagai strata hierarkis. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang holistik dan terverifikasi mengenai dinamika komunikasi organisasional dalam konteks KPID Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Informasi tersebar merata, terlihat dari pernyataan Bu Sundari bahwa temuan monitoring disampaikan ke semua komisioner, bukan hanya ke satu pihak. Pengambilan keputusan melibatkan banyak pihak, tercermin dalam proses rapat pleno yang mengikutsertakan seluruh komisioner untuk mencapai kesepakatan bersama. Alur informasi bersifat fleksibel, ditunjukkan oleh adanya komunikasi *bottom-up* melalui aduan masyarakat dan *top-down* melalui temuan tim monitoring. Tingkat responsivitas organisasi tinggi, terlihat dari kemampuan KPID untuk memproses aduan dengan cepat.

Seluruh anggota terlibat aktif, tergambar dari peran yang dimainkan oleh berbagai pihak, mulai dari Ketua KPID, komisioner, hingga staf ahli dan staf monitoring dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi komunikasi seperti *Zoom* dan *WhatsApp*, seperti yang dijelaskan oleh Pak Yosua, juga mendukung komunikasi yang lebih fleksibel dan efisien dalam organisasi.

Berdasarkan analisis tersebut pola komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan pelanggaran kebijakan isi siaran pada KPID Jawa Timur cenderung mengikuti pola komunikasi bintang (*star pattern*).



Gambar 4.4

Sumber. Diadaptasi dari "Pola Komunikasi Organisasi dalam Menangani Konflik" oleh Aristiani & Laras (n.d.)

Pola Bintang

Pada posisi A, yang merupakan pusat dari pola bintang, terdapat Ketua KPID Jawa Timur, yaitu Pak Yosua. Sebagai pemimpin tertinggi, beliau memiliki akses komunikasi langsung dengan semua elemen organisasi. Posisi B ditempati oleh Koordinator Bidang

Pengawasan Isi Siaran, Bu Sundari, yang memiliki peran krusial dalam pengawasan dan dapat berinteraksi langsung dengan semua pihak. Posisi C diisi oleh komisioner KPID lainnya yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan rapat pleno. Sementara itu, posisi D ditempati oleh Staf Ahli Pengawasan Isi Siaran, Nonik, yang bertanggung jawab atas monitoring dan pelaporan. Terakhir, posisi E diisi oleh staf monitoring lainnya yang juga berperan dalam proses pengawasan dan pelaporan.

Pola ini ditandai dengan adanya desentralisasi informasi, di mana semua anggota komisioner dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa harus melalui satu pusat. Hal ini tercermin dari pernyataan Bu Sundari, "*Temuan monitoring, saya sampaikan ke semua komisioner karena kita bergerak secara kolektif-kolegial,*" yang menunjukkan bahwa informasi tidak terpusat melainkan dibagikan ke semua anggota.

Karakteristik lain dari pola bintang yang terlihat dalam KPID Jawa Timur adalah pengambilan keputusan yang kolektif. Bu Sundari menyatakan, "*Sejauh ini tidak ada hambatan berarti. Bidang lain biasanya mengikuti pendapat dari bidang pengawasan isi siaran. Pada akhirnya diputuskan dengan kesepakatan bersama seluruh komisioner.*" Pernyataan ini menggambarkan bahwa meskipun Bidang Pengawasan Isi Siaran memiliki pengaruh, keputusan akhir tetap melibatkan semua komisioner, tidak ada satu 'pusat' yang mendominasi seperti dalam pola roda.

Fleksibilitas alur informasi, ciri khas pola bintang lainnya, juga terlihat di KPID Jawa Timur. Informasi bisa berasal dari bawah (*bottom-up*) melalui aduan masyarakat, maupun dari atas (*top-down*) melalui temuan monitoring. Bu Sundari menyatakan, "*80% penindakan memang berasal dari aduan masyarakat,*" menunjukkan dominasi arah aliran komunikasi *bottom-up*. Namun, arah aliran komunikasi *top-down* juga berperan, seperti ketika Bu Sundari menyampaikan, "*Temuan dari tim monitoring maksudnya ke aku dulu. Tak screening dulu. Nah, nanti kalau beneran ini kelihatannya temuan aku kasih ke Pak Rommel untuk tindak lanjut.*" Kedua pola ini terintegrasi dalam pola bintang, di mana semua informasi dibahas bersama.

Pola bintang juga memungkinkan respons yang cepat dan efisien, seperti yang diungkapkan Bu Sundari, "*Aduan bisa langsung diproses.*" Efisiensi dan responsivitas ini menjadikan pola bintang lebih sesuai dibandingkan pola lingkaran yang meskipun demokratis, kurang efisien karena informasi harus melalui semua anggota secara berurutan.

Meskipun terdapat kolaborasi dan koordinasi antar bidang, serta pola interaksi informal antar anggota organisasi, namun dalam proses pengambilan keputusan pelanggaran kebijakan isi siaran, pola komunikasi yang paling menonjol adalah pola roda. Hal ini tercermin dari pernyataan Bu Sundari yang menyampaikan temuan monitoring ke semua komisioner karena bergerak secara kolektif-kolegial, serta melakukan screening awal sebelum meneruskan ke anggota lain untuk tindak lanjut. Nonik juga menegaskan bahwa untuk pengambilan keputusan pelanggaran dan sanksi, komisioner yang mengadakan sidang pleno sesuai regulasi. Dengan demikian, komisioner, khususnya Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, bertindak sebagai pemimpin atau pusat yang menghubungkan aliran informasi dan pengambilan keputusan dalam pola komunikasi bintang di KPID Jawa Timur.

Hasil observasi interaksi di ruang rapat KPID Jawa Timur semakin memperkuat identifikasi pola komunikasi bintang yang telah dianalisis sebelumnya. Suasana rapat yang hidup dan dinamis mencerminkan karakteristik utama pola bintang, di mana informasi tersebar merata dan semua anggota dapat berpartisipasi aktif. Kepemimpinan inklusif yang ditunjukkan oleh Pak Yosua, yang mengundang masukan dari seluruh peserta, sejalan dengan posisi pusat dalam pola bintang yang memiliki akses komunikasi langsung dengan semua elemen organisasi. Tingkat interaksi yang tinggi di antara peserta rapat, termasuk

keaktifan dalam mengajukan pertanyaan kritis, mencerminkan karakteristik pola bintang di mana komunikasi dapat terjadi langsung antar anggota tanpa harus melalui satu pusat.

Komunikasi multi-arah yang terlihat dalam rapat, di mana pandangan Bu Riska disambut dengan penuh perhatian oleh rekan-rekannya, menunjukkan adanya komunikasi efektif dalam berbagai arah, mendukung fleksibilitas alur informasi yang menjadi ciri khas pola bintang. Toleransi terhadap pandangan yang berbeda dan suasana inklusif yang tercipta dalam rapat memperkuat aspek pengambilan keputusan kolektif yang merupakan karakteristik penting pola bintang di KPID Jawa Timur. Kesetaraan dalam berpendapat, di mana staf muda diberikan kebebasan untuk menyuarakan ide-ide segar, semakin menguatkan aspek desentralisasi informasi dalam pola ini.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat, kemampuan peserta rapat untuk tetap menjaga etika komunikasi dan kembali fokus pada topik utama dengan efisien mencerminkan responsivitas dan efisiensi yang menjadi keunggulan pola bintang. Adanya elemen komunikasi informal, seperti kehadiran toples camilan sebagai jeda singkat, menunjukkan keterbukaan dan keakraban yang mendukung fleksibilitas komunikasi dalam pola bintang. Dengan demikian, hasil observasi ini tidak hanya memperkuat kesimpulan bahwa pola bintang adalah yang paling sesuai untuk menggambarkan komunikasi organisasi di KPID Jawa Timur, tetapi juga menunjukkan bahwa pola ini termanifestasi dalam dinamika interaksi sehari-hari, bukan hanya dalam struktur formal organisasi.

Pola komunikasi bintang ini juga lebih cocok dibandingkan pola rantai yang terlalu kaku, pola Y yang masih terlalu hierarkis, atau pola roda yang terlalu tersentralisasi. Pola bintang mencerminkan sistem "kolektif-kolegial" KPID Jawa Timur, di mana informasi bisa berasal dari mana saja (bottom-up atau top-down), semua anggota terlibat dalam diskusi, dan keputusan diambil bersama. Pola ini memungkinkan KPID untuk responsif terhadap masyarakat, efisien dalam proses, dan tetap menjaga sifat kolektif dalam pengambilan keputusan pelanggaran kebijakan isi siaran.

Penelitian ini menganalisis pola komunikasi yang ditemukan di KPID Jawa Timur dalam konteks teori sistem organisasi, khususnya menggunakan kerangka yang dikemukakan oleh Scott (Pace dan Faules, 2018: 63). Analisis ini bertujuan untuk memberikan perspektif teoretis yang kuat terhadap praktik komunikasi di lembaga tersebut. Scott mengidentifikasi lima elemen kunci dalam sistem organisasi, yang akan dibahas dalam kaitannya dengan pola komunikasi bintang yang ditemukan di KPID Jawa Timur.

1. Individu dan Kepribadian Dalam pola komunikasi bintang KPID Jawa Timur, setiap individu memiliki peran signifikan. Ketua (Pak Yosua), Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (Bu Sundari), dan Staf Ahli (Nonik) masing-masing membawa kepribadian dan keahlian unik yang mempengaruhi dinamika organisasi. Pola ini memungkinkan setiap anggota untuk berkontribusi langsung dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan, merefleksikan asumsi bahwa setiap individu memiliki pengaruh penting terhadap sistem organisasi secara keseluruhan.
2. Struktur Formal Meskipun KPID Jawa Timur mengadopsi pola komunikasi bintang yang lebih fleksibel, struktur formal tetap berperan penting. Hierarki yang meliputi Ketua, Komisioner, dan Staf tetap menjadi kerangka dasar organisasi. Namun, pola bintang memungkinkan komunikasi lintas level hierarki dengan lebih mudah, menciptakan keseimbangan antara struktur formal dan fleksibilitas komunikasi.
3. Pola Interaksi Informal Pola komunikasi bintang di KPID Jawa Timur mendukung berkembangnya interaksi informal yang kuat. Penggunaan grup WhatsApp untuk berbagi informasi dan diskusi menunjukkan adanya jalur komunikasi informal yang melengkapi struktur formal. Interaksi informal ini berkontribusi pada aliran informasi yang lebih cepat dan dinamis dalam organisasi.

4. Pola Status dan Peranan Dalam pola bintang KPID Jawa Timur, meskipun ada perbedaan status dan peran, model komunikasi ini memungkinkan kontribusi dari semua level. Ekspektasi terhadap peran masing-masing tetap ada, namun pola bintang memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif, mengurangi hambatan komunikasi yang mungkin timbul dari perbedaan status.
5. Lingkungan Fisik Pekerjaan Penerapan pola komunikasi bintang di KPID Jawa Timur telah memungkinkan organisasi untuk mengatasi keterbatasan lingkungan fisik. Penggunaan teknologi komunikasi seperti *Zoom* dan *WhatsApp* memungkinkan anggota untuk tetap terhubung dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, terlepas dari lokasi fisik mereka. Ini menunjukkan adaptasi organisasi terhadap lingkungan kerja yang berubah, sambil mempertahankan efektivitas komunikasi.

Dengan menerapkan pola komunikasi bintang, KPID Jawa Timur telah menciptakan sistem organisasi yang lebih adaptif dan responsif. Model ini memungkinkan integrasi yang efektif antara elemen-elemen yang disebutkan dalam asumsi Scott, menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung aliran informasi yang efisien, pengambilan keputusan yang kolaboratif, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pola komunikasi bintang di KPID Jawa Timur tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi internal, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi regulatorinya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari pola komunikasi ini terhadap kinerja organisasi dan efektivitas pengawasan penyiaran di tingkat daerah.

Penutup

Penelitian ini mengungkap bahwa pola komunikasi organisasi KPID Jawa Timur dalam pengambilan keputusan pelanggaran kebijakan isi siaran cenderung mengikuti pola komunikasi bintang (*star pattern*). Pola ini ditandai dengan desentralisasi informasi, pengambilan keputusan kolektif, dan fleksibilitas alur komunikasi. Ketua KPID Jawa Timur berada di pusat pola, memiliki akses komunikasi langsung dengan seluruh elemen organisasi. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran menempati posisi krusial dengan peran penting dalam pengawasan dan interaksi langsung dengan semua pihak.

Karakteristik utama pola bintang yang teridentifikasi meliputi desentralisasi informasi, di mana semua anggota komisioner dapat berkomunikasi langsung tanpa harus melalui satu pusat. Pengambilan keputusan bersifat kolektif, meskipun Bidang Pengawasan Isi Siaran memiliki pengaruh, keputusan akhir tetap melibatkan semua komisioner. Alur informasi menunjukkan fleksibilitas, dapat berasal dari bawah (*bottom-up*) melalui aduan masyarakat, maupun dari atas (*top-down*) melalui temuan monitoring. Pola ini juga memungkinkan respons yang cepat dan efisien, dengan aduan yang dapat langsung diproses.

Alur proses pengambilan keputusan di KPID Jawa Timur melibatkan beberapa tahapan sistematis, dimulai dari identifikasi temuan/aduan, verifikasi, sidang pemanggilan untuk klarifikasi, rapat pleno untuk pembahasan dan pengambilan keputusan final, hingga penetapan sanksi jika terbukti melanggar. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan meliputi jenis pelanggaran, frekuensi pelanggaran lembaga penyiaran, upaya pendekatan kekeluargaan, hukum positif yang berlaku, serta faktor-faktor kontekstual untuk kasus yang belum diatur secara baku.

Meskipun KPID Jawa Timur telah menerapkan pola komunikasi yang efektif, beberapa hambatan masih teridentifikasi. Ini termasuk perbedaan persepsi/asumsi antar anggota karena karakteristik dan kepribadian yang berbeda, potensi kesenjangan informasi antara staf dan

komisioner karena pembagian wewenang dalam pengambilan keputusan akhir, serta kendala dalam mengkoordinasikan pertemuan tatap muka karena kesibukan para komisioner.

Analisis juga menunjukkan bahwa KPID Jawa Timur menerapkan prinsip-prinsip teori sistem dalam operasionalnya. Ini tercermin dalam nonsumativitas organisasi yang berfungsi sebagai kesatuan, adanya unsur-unsur struktur, fungsi, dan evaluasi yang jelas, sifat keterbukaan sistem melalui interaksi dengan lingkungan eksternal, serta hierarki yang fleksibel dengan penekanan pada komunikasi kelompok dan antarpersonal.

Pola komunikasi bintang yang diterapkan KPID Jawa Timur mencerminkan sistem "kolektif-kolegial" yang memungkinkan organisasi untuk responsif terhadap masyarakat, efisien dalam proses, dan tetap menjaga sifat kolektif dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip-prinsip teori sistem juga memungkinkan KPID Jawa Timur untuk beroperasi sebagai sistem yang dinamis dan adaptif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas penyiaran di wilayah Jawa Timur.

Daftar Pustaka

Pace, R. W., & Faules, D. F. (1998). *Komunikasi organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. Remaja Rosdakarya.

Kholiq, M. (2010). POLA KOMUNIKASI ORGANISASI (Studi Kasus: Pola Komunikasi Antara Pimpinan dan Karyawan di Radio Kota Perak Yogyakarta). *Komunikasi Dan Penyiaran*, 1(1), 8–9. digilib.uin-suka.ac.id

Nana Nainggolan, Arin Gandasari, Dewa Ardiana, Bonaraja Kato, Marto Silalahi, Sukarman Rahayu, Wika Firdaus, M. S. (2021). *Komunikasi Organisasi: Teori, Inovasi dan Etika*. In Yayasan Kita Menulis. (Issue April).

Prasetyo, F. E. (2017). Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran Di Samarinda. *5(4)*, 41–55.

Ardial. *Fungsi Komunikasi Organisasi: Studi Kasus Tentang Fungsi Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai*. Medan: Lembaga Penerbit dan Penulis Ilmiah AQLI, 2018.

Hutahaean, W. S. (2021). *Filsafat dan teori kepemimpinan*. Ahlimedia Press. A.Foss, S. W. (2009). *Teori Komunikasi "Theories of human communication"*. Jakarta: Salemba Humanika

Seriadi, S. L. N., & Wilantari, N. K. T. W. (2021). Pola Komunikasi Organisasi Mahasiswa Dalam Penerapan Ajaran Wacika Parisudha. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.25078/vs.v7i1.2581>

Setyawati, N. K. D., Prijowidodo, G., & Inggrit, I. (2019). Pola Komunikasi Organisasi Pdi Perjuangan Dalam Proses Kaderisasi Di Dpc Kabupaten Sidoarjo. *Scriptura*, 8(1), 30–40. <https://doi.org/10.9744/scriptura.8.1.30-40>

Sjuchro, D. W. (2017). Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi Di Sepuluh Provinsi. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 81–89. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12226>